

**F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</li> <li>4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah.</li> <li>5. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam, dan luar negeri.</li> <li>6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala daerah.</li> <li>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</li> <li>9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala daerah.</li> <li>10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala daerah.</li> <li>11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</li> <li>12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala daerah.</li> <li>13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala daerah.</li> <li>14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala daerah.</li> <li>15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala daerah.</li> <li>16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil skala daerah.</li> <li>17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan skala daerah.</li> </ol>
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</li> <li>3. Kerja sama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam, dan luar negeri skala daerah.</li> </ol>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi kerja sama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam, dan luar negeri skala daerah.</li> <li>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</li> <li>6. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</li> <li>7. Konsultasi pelayanan perkotaan.</li> <li>8. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa.</li> <li>9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala daerah.</li> <li>10. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa.</li> <li>11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil skala daerah.</li> <li>12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan skala daerah.</li> <li>13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</li> <li>14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</li> <li>15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</li> </ol>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala daerah.</li> <li>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</li> <li>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam, dan luar negeri skala daerah.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil skala daerah.</li> <li>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan skala daerah.</li> <li>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala daerah.</li> <li>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</li> </ol>

